

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian. Selain itu akan dijabarkan pula ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, serta metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan penelitian, konseptualisasi penelitian, operasionalisasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1.1 Latar Belakang

Sejak masa orde baru, pengembangan wilayah di Indonesia telah diarahkan pada industrialisasi. Banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung pengembangan sektor industri di Indonesia. Rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dimulai pada tahun 1969 mengandung sejumlah kebijakan reformasi ekonomi yang krusial pada dekade 70-an dan 80-an, termasuk liberalisasi dalam investasi, neraca modal, perbankan, dan perdagangan eksternal. Pemerintah orde baru pada saat itu menjadikan industri sebagai sektor prioritas utama (Tambunan, 2009). Kebijakan pengembangan industri di Indonesia pun terus berlanjut. Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, dan selanjutnya kembali dibentuk Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2011 pemerintah pun mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui program MP3EI, dengan enam koridor ekonomi diharapkan dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kluster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Dengan demikian, Indonesia sangat jelas menganut konsep pengembangan kutub pertumbuhan (*growth pole*) (Nurzaman, 1999). Dalam konsep kutub pertumbuhan, perkembangan wilayah diharapkan akan terjadi melalui adanya penjalaran dari sektor *leading* atau industri propulsif ke sektor lainnya.

Seiring dengan munculnya kebijakan pengembangan industri, perkembangan industri di banyak wilayah di Indonesia terus meningkat, khususnya di wilayah Indonesia bagian Barat. Struktur ekonomi Indonesia pun berubah, dari struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur (Harefa, 2011). Perkembangan industri-industri tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB wilayah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian pengembangan sektor industri sebagai sektor *leading* yang dilakukan di Indonesia belum mampu memberikan penjalaran terhadap sektor lainnya. Perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia hanya terjadi pada level nasional. Bahkan, kebijakan pengembangan industri tersebut secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antar pulau, antar provinsi, dan antar kabupaten (Harefa, 2011). Selain itu, perkembangan industri pun telah menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi (Nurzaman, 2012).

Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami perkembangan industri dengan cepat adalah Kabupaten Bekasi. Saat ini Kabupaten Bekasi bahkan menempati posisi keempat untuk jumlah industri pengolahan paling banyak di Provinsi Jawa Barat. Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2000 adalah Rp.25.503.822 juta atau 84,26% dari total PDRB keseluruhan. Tahun-tahun selanjutnya, sektor industri pengolahan pun tetap mendominasi PDRB Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2013, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencapai Rp.89.189.277 juta atau 78% dari total PDRB Kabupaten Bekasi keseluruhan. (BPS, 2014)

Sama halnya dengan wilayah lain, keberadaan industri di Kabupaten Bekasi pun belum dapat menjalarkan pertumbuhan pada sektor lainnya dan belum dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2012, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 93.375 orang dari total angkatan kerja sebanyak 1.890.713 orang atau

sebanyak 5% dari total angkatan kerja keseluruhan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pun semakin mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya garis kemiskinan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mencapai 6,11% dari total penduduk keseluruhan. Selain itu, keberadaan industri di Kabupaten Bekasi pun menimbulkan beberapa dampak negatif berupa alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan, perubahan aspek sosial ekonomi masyarakat, serta pencemaran lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) pun membuktikan bahwa perkembangan industri di Kabupaten Bekasi menyebabkan hilangnya kesempatan kerja masyarakat lokal karena pekerja industri didominasi oleh masyarakat pendatang, serta terjadinya pencemaran air, udara, dan suara.

Untuk meredakan dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat penerapan konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*) di Indonesia, diperlukan konsep pengembangan wilayah lainnya. Dalam hal ini salah satu konsep yang dapat digunakan adalah konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL). Konsep pengembangan ekonomi lokal pun telah banyak digunakan di negara-negara berkembang seperti Asia Timur dan Amerika Latin. Rogerson (1995) dalam Nurzaman (2012) menyatakan bahwa konsep pengembangan ekonomi lokal di negara berkembang terjadi karena adanya restrukturisasi global, yaitu perkembangan ekonomi dunia yang membawa perubahan dalam struktur industri dunia sehingga mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan pada wilayah-wilayah dan lokalitas di negara berkembang. Sementara itu, di negara maju, berkembangnya konsep pengembangan ekonomi lokal ini berkaitan dengan melemahnya pengelolaan ekonomi yang terpusat, adanya usaha dari lokasi setempat untuk menanggulangi restrukturisasi ekonomi global (misalnya adanya relokasi industri ke negara berkembang), serta adanya disintegrasi vertikal dari sistem produksi yang memungkinkan tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil (Rogerson, 1995 dalam Nurzaman, 2012).

Konsep pengembangan ekonomi lokal menekankan pengendalian lokal, menggunakan potensi penduduk lokal, serta kemampuan kelembagaan dan kondisi fisik lokal. Selain itu, kekuatan eksternal atau global yang berkaitan

dengan ekonomi lokal pun dimanfaatkan untuk pengembangan lokal ini (Nurzaman, 2012). Berdasarkan konsep tersebut, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu perwujudan dari konsep pengembangan ekonomi lokal. Hal tersebut karena UMKM memiliki suatu signifikansi lokal yang khusus terutama untuk ekonomi perdesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan sangat ditentukan oleh kemajuan perkembangan UMKMnya (Tambunan, 2009). Selain itu, UMKM pun berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dan berperan dalam memanfaatkan dan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal yang mereka gunakan (Ngasongwa, 2002).

Kabupaten Bekasi memiliki banyak UMKM yang berpotensi menjadi basis pengembangan ekonomi lokal. Pada tahun 2012, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi mencatat bahwa terdapat 581 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan sebarannya pada setiap kecamatan, Kecamatan Setu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bekasi yang memiliki banyak jumlah UMKM. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031, Kecamatan Setu pun ditetapkan sebagai satu-satunya lokasi industri mikro dan rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Adapun kegiatan industri besar dan menengah tidak diperbolehkan di Kecamatan Setu. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa jenis UMKM yang mendominasi di Kecamatan Setu adalah UMKM aksesoris yang seluruhnya berlokasi di Desa Taman Rahayu. UMKM aksesoris di Desa Taman Rahayu telah berkembang sejak lama dan terbukti dapat menyerap paling banyak jumlah tenaga kerja dan menghasilkan omset per bulan paling banyak daripada jenis UMKM lainnya pada setiap kecamatan. Dengan banyaknya jumlah UMKM serta adanya kebijakan pelarangan industri besar untuk beroperasi di Kecamatan Setu, maka diperlukan penelitian mengenai sejauh mana peran UMKM tersebut dalam menjadi basis pengembangan ekonomi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan industri di suatu wilayah belum dapat menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Hasil studi yang telah dilakukan menyatakan bahwa meskipun kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik, namun masih banyak permasalahan mendasar yang belum tertangani, seperti masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan besarnya ketimpangan aktivitas perekonomian antarwilayah (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Berdasarkan penelitian pun diketahui bahwa industri hanya dapat memberikan dampak positif terhadap satu dari delapan indikator kesejahteraan yang digunakan, yaitu: tingkat penghasilan (Kautsar 2007). Selain belum dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduk, pertumbuhan aglomerasi industri yang tidak terkendali pun dapat menimbulkan tumbuhnya sektor-sektor informal yang menimbulkan dampak negatif, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana, kurangnya pelayanan akan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan juga penurunan kualitas lingkungan (Santoso, 2013).

Kelemahan lain yang dimiliki oleh industri adalah membutuhkan belanja modal (infrastruktur) yang sangat mahal. Belanja infrastruktur perlu dilakukan agar suatu wilayah dapat menyerap investasi industri. Selama tahun 2011-2014 misalnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan investasi infrastruktur sebanyak Rp.863,6 Triliun untuk mendukung proyek MP3EI. Keberadaan beberapa infrastruktur ekonomi yang terdiri dari *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya) dinilai dapat memengaruhi suatu investasi (Rahimah, 2014). Hasil studi yang dilakukan Rahimah (2014) menyatakan bahwa secara spasial, investasi menyebar mengikuti adanya infrastruktur yang memadai sehingga investor berminat untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Dengan demikian, wilayah yang memiliki infrastruktur yang kurang baik tidak akan mampu bersaing dengan wilayah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik dalam hal menyerap investasi. Adanya kondisi tersebut kemudian akan menyebabkan semakin besarnya kemungkinan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang diakibatkan oleh sektor industri.

Selain itu, industri pun sangat bergantung pada investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Padahal, investasi yang ditanamkan di suatu wilayah memiliki kondisi tidak pasti dan dapat berubah-ubah jumlahnya sesuai dengan iklim investasi di wilayah tersebut. Sukwiaty et al (2007) menyatakan bahwa banyak faktor yang memengaruhi iklim investasi di suatu wilayah. Dalam hal penanaman modal, investor akan menyoroti stabilitas makroekonomi, kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, praktik korupsi bahkan kompetensi tenaga kerja. Selama krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 misalnya, banyak investor memindahkan aset/modal yang dimiliki keluar dari Indonesia. Hasil penelitian Virgantari (2010) membuktikan bahwa terjadi peningkatan *outward capital flow* atau aliran modal keluar dari Indonesia secara signifikan pada periode 1997-1998 yang mencapai nominal 7,25 milyar USD. Hal tersebut terjadi karena adanya depresiasi nilai mata uang Rupiah sehingga menyebabkan investasi di Indonesia kurang menguntungkan dibandingkan negara lain. Aliran modal keluar yang terjadi selama masa krisis menyebabkan banyak usaha besar mengalami kebangkrutan, serta menyebabkan perekonomian di banyak wilayah menjadi *collapse*. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh sektor industri, dapat dipahami bahwa industri tidak dapat menjadi tumpuan perekonomian suatu wilayah.

Kegiatan ekonomi lain yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perekonomian wilayah adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Winarno (2008) menyatakan bahwa selama krisis, UMKM terbukti menjadi penyelamat kebangkrutan ekonomi akibat pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*). Hal tersebut terjadi karena UMKM tahan terhadap iklim investasi yang ekstrim. Dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan wilayah di negara-negara berkembang maupun negara maju (Tambunan, 2009). Tambunan (2009) menjelaskan bahwa di negara-negara berkembang, UMKM berperan penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Bahkan, di negara-negara maju, UMKM telah menyerap lebih banyak

tenaga kerja jika dibandingkan dengan usaha besar, dan kontribusi UMKM terhadap PDRB pun lebih besar daripada kontribusi usaha besar.

Peran UMKM terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan PDRB tidak dapat terelakkan. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan UMKM yang menyediakan lapangan kerja bagi 60% total tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap hampir 50% PDRB. Di ASEAN, 96% dari total unit usaha merupakan UMKM yang telah menyediakan lapangan kerja untuk 50%-85% dari total tenaga kerja, berkontribusi terhadap 30-53% PDRB dan menyumbang 19-31% barang ekspor. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2012 99,9% dari total unit usaha merupakan UMKM yang telah menyerap 97,16% dari total tenaga kerja, dan menyumbang 59,08% PDRB. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2012)

Keunggulan lain yang dimiliki oleh UMKM daripada usaha besar adalah UMKM memiliki suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi perdesaan. Jumlah perusahaan UMKM sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok perdesaan, terutama di wilayah yang relatif terisolasi. Peran UMKM di perdesaan adalah sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian mengingat semakin sempitnya lahan pertanian di perdesaan (Tambunan, 2009). Dari segi ketenagakerjaan, UMKM terbukti mampu menyerap berbagai kelompok masyarakat dalam angkatan kerja. UMKM mampu mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai gender, usia, dan etnis (Tambunan (2009), Freeman (2013), dan Forth et al (2006)). Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh UMKM, dapat dipahami bahwa keberadaan UMKM di suatu wilayah dapat mendukung penguatan ekonomi lokal yang tidak dapat diperoleh dari kegiatan lainnya, terutama industri besar.

Dari segi sistem produksi, meskipun UMKM cenderung tidak melakukan penelitian dan pengembangan produk (R&D) seperti pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi UMKM mampu berinovasi dengan cara lain (OECD, 2000). Cara-cara tersebut adalah dengan penciptaan atau *re-engineering* produk mereka untuk

memenuhi kebutuhan pasar, memperkenalkan pendekatan organisasi baru untuk meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan teknik baru untuk memperluas penjualan. Meskipun demikian, sistem produksi yang dimiliki UMKM saat ini cenderung kurang memperhatikan dan menyadari eksternalitas terhadap lingkungan daripada jenis usaha besar. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki sumber daya yang lebih sedikit daripada sumber daya yang dimiliki oleh usaha besar untuk berinvestasi pada alat-alat dan manajemen produksi sebagai upaya perbaikan kondisi lingkungan, sehingga melibatkan UMKM sebagai subjek pembangunan berkelanjutan adalah hal yang sulit (OECD, 2000).

Selain itu, terdapat beberapa kelemahan lainnya yang dimiliki oleh UMKM. Tambunan (2009) menguraikan beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM terutama di negara berkembang. Permasalahan umum tersebut adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi, pengadaan bahan baku serta input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, serta ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak menentu arahnya.

Berbagai kelemahan yang dimiliki UMKM tidak lantas menjadikan peran UMKM sebagai sarana pembangunan ekonomi lokal terabaikan. Jika dibandingkan dengan sektor industri, UMKM lebih potensial sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Kedudukan UMKM di suatu wilayah harus berdampingan dengan sektor industri agar pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di wilayah tersebut dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi makro dapat dicapai melalui sektor industri, sedangkan pertumbuhan ekonomi mikro dapat dicapai melalui UMKM. Agar tercapai pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan, UMKM hendaknya memiliki tiga hal penting, yaitu: dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan masyarakat dan fisik yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keberlanjutan; mengurangi kesenjangan berupa kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis; serta

mendorong penggunaan sumber daya dan melakukan kegiatan produksi berkelanjutan (Blakely, 2010). Dengan ketiga hal tersebut, maka pembangunan perekonomian lokal berkelanjutan pun dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal?” Pertanyaan penelitian tersebut kemudian diturunkan menjadi pertanyaan rinci sebagai berikut.

1. Bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis?
3. Apakah UMKM telah menggunakan sumber daya dan melaksanakan kegiatan produksi secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mengidentifikasi peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis
3. Mengidentifikasi sistem pemanfaatan sumber daya dan produksi pada UMKM

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

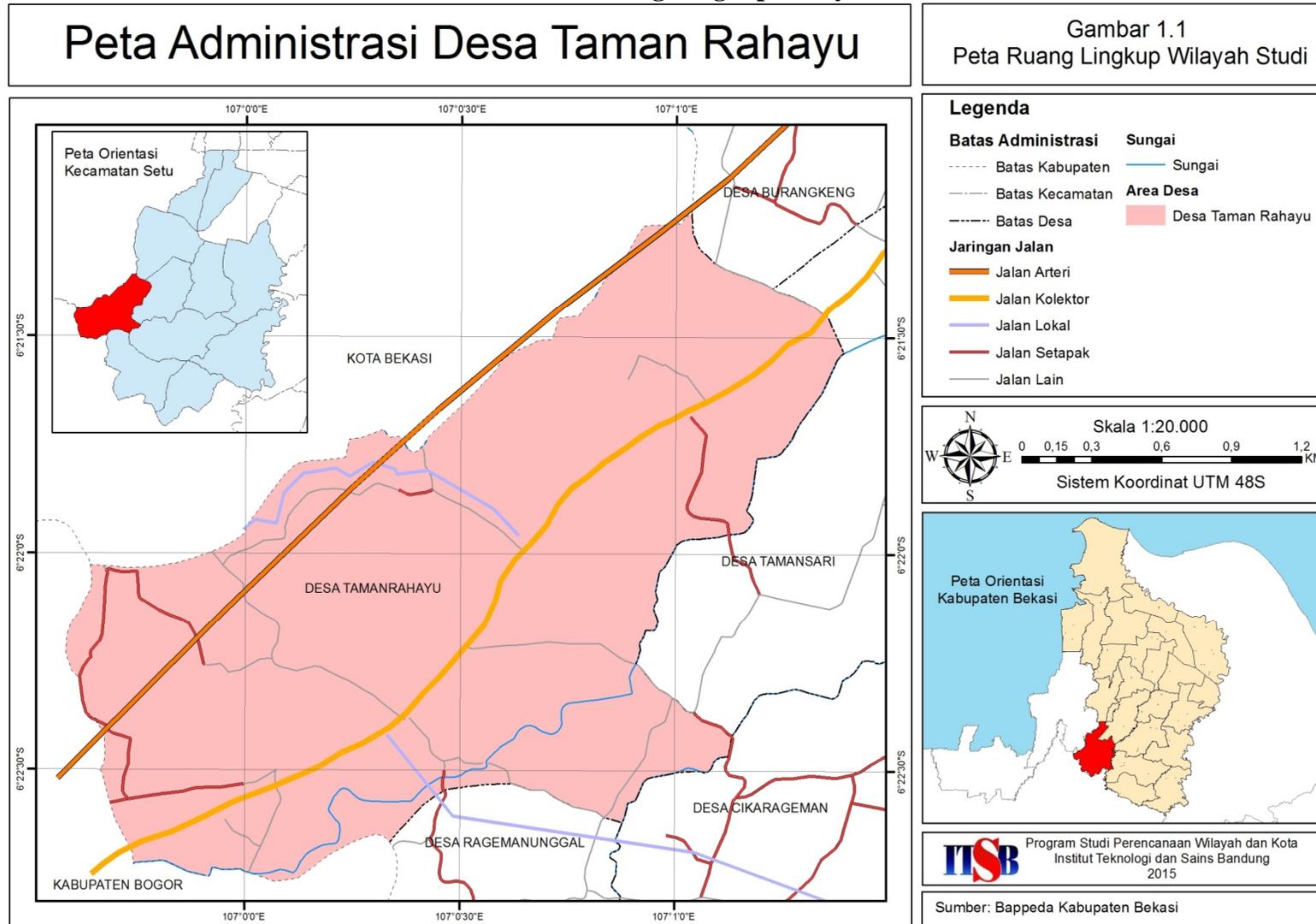
Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah dalam penelitian ini. Sedangkan ruang lingkup materi merupakan batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penelitian ini, wilayah yang dijadikan sebagai wilayah studi adalah Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu yang memiliki jumlah UMKM Aksesoris paling banyak di Kabupaten Bekasi. UMKM aksesoris dipilih karena berdasarkan data sekunder terbukti mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dan menghasilkan omset per bulan paling banyak daripada jenis UMKM lainnya pada setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data sekunder, diketahui bahwa UMKM Aksesoris di Kecamatan Setu terkonsentrasi di Desa Taman Rahayu, khususnya di RT02 dan RT03 Dusun III Kampung Serang. Adapun batas-batas Desa Taman Rahayu secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Taman Sari
- Sebelah Timur: Desa Cikarageman
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat: Kota Bekasi

Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Studi



Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi

Institut Teknologi dan Sains Bandung

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Materi dalam penelitian ini akan dibatasi pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada UMKM. Menurut Blakely (2010), suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat yang bekerja pada kegiatan ekonomi tersebut mampu mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih baik daripada sebelumnya, memiliki tempat tinggal yang sesuai standar, mampu menyisihkan uang untuk tabungan usia tua mereka, memiliki akses yang baik terhadap sarana kesehatan, serta mampu menyediakan akses yang baik bagi pendidikan anak-anak mereka. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan kelima syarat yang disebutkan oleh Blakely tersebut, namun dengan penyesuaian berbagai tolok ukur dan konsep pengukuran kesejahteraan yang berlaku di Indonesia yaitu Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Need Approach*) yang dikeluarkan oleh BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat (IkRar) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Panduan Pengkajian Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR), serta Pedoman Rumah Sederhana Sehat yang dikeluarkan oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan berupa kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis. Dalam penelitian ini, pengurangan kesenjangan wilayah oleh UMKM dilihat melalui keterkaitan (*linkage*) yang tercipta oleh UMKM dengan kegiatan ekonomi lainnya sehingga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Blakely (2010), bahwa daya tarik, ekspansi, dan munculnya suatu kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain yang ada di suatu wilayah akan memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih menguntungkan daripada kegiatan

ekonomi lain yang tidak memiliki keterkaitan lokal. Dalam hal ini, konsep pengurangan kesenjangan wilayah yang digunakan merupakan konsep keterkaitan yang dicetuskan oleh Hirschman (*Hirschmanian Linkage*). Sedangkan pengurangan kesenjangan demografis dilihat dari kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja dari berbagai golongan masyarakat tanpa adanya diskriminasi pada mereka. Menurut Blakely (2010), suatu kegiatan ekonomi hendaknya mampu mengurangi kesenjangan demografis berupa pengurangan kesenjangan antar umur, antar gender, serta antar ras dan etnis. Adapun konsep pengurangan kesenjangan demografis yang digunakan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia yang dicetuskan oleh International Labor Organization (ILO) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

3. Pengelolaan sumber daya dan produksi berkelanjutan oleh UMKM dilihat dari keberlanjutan UMKM dari segi lingkungan dan ekonomi. Dalam hal keberlanjutan lingkungan, suatu kegiatan ekonomi harus mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Adapun pengelolaan sumber daya berkelanjutan tersebut dapat dilihat dari apakah kegiatan ekonomi tersebut mampu menggunakan dan mengelola sumber daya yang mereka gunakan secara efektif dan efisien, kemampuan mengolah limbah dengan baik, penggunaan metode dan teknik yang meminimalisasi limbah dan kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya (Roberts, 2004). Sedangkan keberlanjutan UMKM dalam hal ekonomi dilihat dari bagaimana UMKM tersebut mampu menerapkan sistem produksi berkelanjutan melalui inovasi dan pasar yang terus meluas. Dalam hal inovasi, menurut Rogers (1982), inovasi pada suatu kegiatan ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan produksi, perakitan, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Sedangkan upaya untuk memperluas pasar dilakukan melalui upaya penetrasi pasar dan pengembangan pasar seperti yang dikemukakan oleh Ansoff (1951) yang lebih dikenal sebagai Ansoff Product Market Growth Matrix.

1.5 Manfaat Studi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperkuat peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi UMKM di wilayah Bekasi, khususnya pada jenis UMKM aksesoris di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu sehingga dapat dijadikan informasi awal sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perumusan dan penetapan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian terdiri atas metode pendekatan penelitian, konseptualisasi penelitian, operasionalisasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*) yang merupakan penggabungan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian campuran merupakan suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih valid, handal, dan objektif. Penggunaan metode penelitian campuran dalam penelitian ini dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa nilai yang dapat dianalisis dengan statistik dan dapat digunakan untuk menilai frekuensi dan besarnya kecenderungan, serta data kualitatif berupa hasil-hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Adapun strategi pendekatan campuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model *concurrent strategy*. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data

dalam satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan.

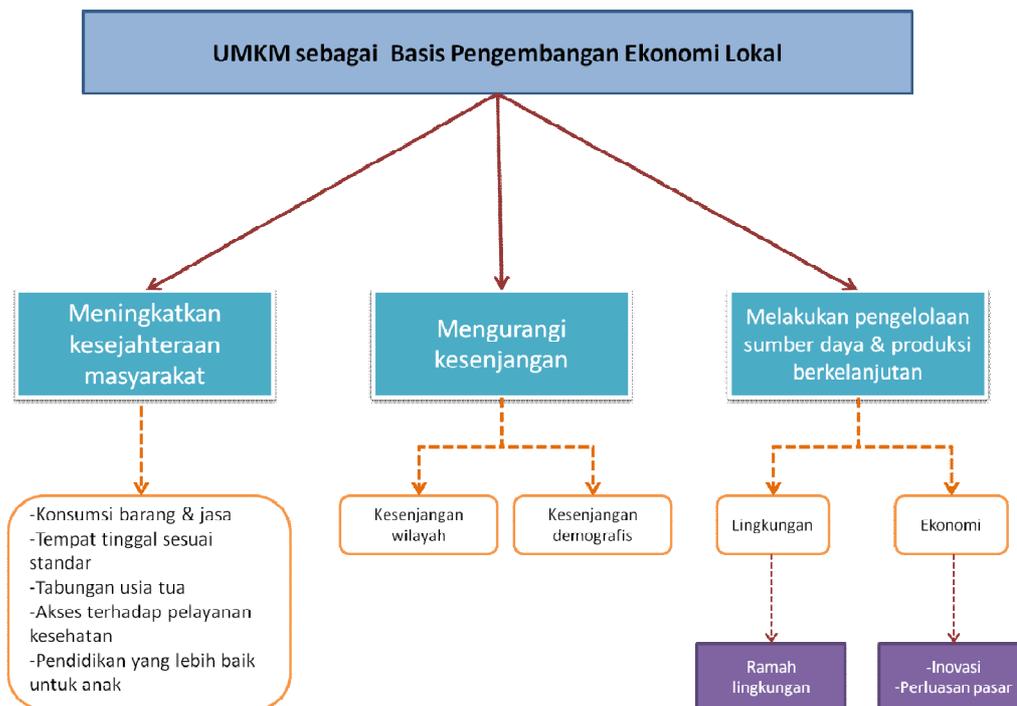
Pendekatan kuantitatif merupakan metode untuk meneliti hubungan antar variabel yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2009). Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dilakukan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja di UMKM. Data yang dibutuhkan dalam pendekatan kuantitatif ini berupa data jumlah penghasilan dan pengeluaran para pekerja UMKM, akses para pekerja UMKM terhadap pelayanan kesehatan, akses anak-anak para pekerja UMKM terhadap sarana pendidikan, jumlah tabungan yang dimiliki, serta kondisi tempat tinggal para pekerja UMKM saat ini.

Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, yang dianalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis, serta bagaimana sistem pengelolaan sumber daya dan produksi pada UMKM. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data-data kualitatif dari hasil wawancara maupun observasi. Adapun metode penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus tunggal merupakan penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian (Yin, 2003).

1.6.2 Konseptualisasi Penelitian

Konseptualisasi penelitian ini disusun dengan melakukan tinjauan pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh UMKM agar dapat menjadi basis pengembangan ekonomi lokal, yaitu mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis, serta mampu melakukan pengelolaan sumber daya dan produksi berkelanjutan. Lebih jelasnya, konseptualisasi penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Konseptualisasi Penelitian

Sumber: Blakely (2010), *Basic Need Approach* BPS (2015), Indikator Kesejahteraan Rakyat (2012), Pedoman Rumah Sederhana Sehat (2002), Pedoman Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga–CIFOR (2007), Jones (1976), International Labour Organization (2013), Roberts (2004), Rogers (1983), Schultz (2004)

1.6.3 Operasionalisasi Penelitian

Setelah konseptualisasi penelitian disusun melalui kajian berbagai literatur, selanjutnya konsep tersebut diturunkan kedalam indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam konsep tersebut. Indikator dan tolok ukur yang telah disusun kemudian dijadikan sebagai daftar kebutuhan data untuk kegiatan penelitian ini. Secara garis besar, konsep peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal diturunkan menjadi tiga kriteria yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan, serta pengelolaan sumber daya dan produksi berkelanjutan. Operasionalisasi penelitian untuk konsep tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kriteria	Indikator	Tolok Ukur
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Konsumsi barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses rumah tangga terhadap listrik 2. Akses rumah tangga terhadap air bersih 3. Konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna 4. Perbandingan jumlah pengeluaran makanan dan non makanan per kapita per bulan terhadap garis kemiskinan Jabar
	Tempat tinggal yang sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan minimum per orang (9m²/orang) 2. Struktur rumah sebagian besar terbuat dari kayu atau semen dan pasir 3. Kepemilikan jamban 4. Pencahayaan alami yang cukup 5. Udara bersih yang cukup melalui pengaturan sirkulasi udara 6. Lantai kering dan mudah dibersihkan 7. Atap yang rapat dan tidak bocor 8. Kepemilikan kendaraan dan barang elektronik
	Tabungan usia tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menyisihkan uang untuk menabung 2. Jumlah tabungan di bank 3. Jumlah investasi barang/tanah
	Akses terhadap pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mendapatkan pelayanan medis ketika sakit 2. Kepemilikan asuransi kesehatan
	Pendidikan yang lebih baik untuk anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menyediakan akses terhadap pendidikan bagi anak 2. Kepemilikan tabungan pendidikan

Sumber: Blakely (2010), *Basic Need Approach* BPS (2015), Indikator Kesejahteraan Rakyat (2012), Pedoman Rumah Sederhana Sehat (2002), Pedoman Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga-CIFOR (2007)

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep Pengurangan Kesenjangan

Kriteria	Indikator	Tolak Ukur
Pengurangan Kesenjangan	1. Pengurangan kesenjangan wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Input (backward linkage) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan bahan baku lokal 2. Penggunaan jasa lokal sebagai input 3. Penyerapan tenaga kerja lokal
	<ul style="list-style-type: none"> ● Output (forward linkage) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjual barang/jasa untuk kegiatan ekonomi lain 2. Menjual barang/jasa ke pasar lokal 3. Munculnya kegiatan ikutan pendukung UMKM (pembungkusan, pelabelan, pengiriman)
	2. Pengurangan kesenjangan demografis	
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengurangan kesenjangan antar umur ● Pengurangan kesenjangan antar gender ● Pengurangan kesenjangan antar etnis 	<p>Menyerap tenaga kerja berbagai usia dari angkatan kerja (15-65 tahun)</p> <p>Proporsi pekerja wanita dibandingkan dengan pria</p> <p>Tenaga kerja berasal dari berbagai etnis</p>	

Sumber: Jones (1976), International Labour Organization (2013)

(Bagian ini dibiarkan kosong)

**Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya
dan Produksi Berkelanjutan**

Kriteria	Indikator	Tolak Ukur
Pengelolaan Sumber Daya dan Produksi Berkelanjutan	Lingkungan	
	Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien (jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan) 2. Pengolahan limbah sebelum dibuang 3. Penggunaan metode serta teknik yang meminimalkan limbah dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan produksi
	Ekonomi	
	1. Inovasi yang terus berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan produksi barang disesuaikan dengan tren pasar 2. Pengembangan jenis barang baru 3. Pengembangan barang dengan desain baru (bentuk, warna, ukuran) 4. Pengembangan produk baru dari bahan sisa produksi 5. Kemampuan meningkatkan jumlah produksi karena ketersediaan modal
	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dalam kegiatan produksi (<i>production</i>) • Inovasi dalam kegiatan perakitan (<i>manufacturing</i>) • Inovasi dalam pengemasan (<i>packaging</i>) • Inovasi dalam pemasaran (<i>marketing</i>) • Inovasi dalam distribusi (<i>distribution</i>) 	<p>Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses perakitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan desain pengemasan yang menarik 2. Mampu meningkatkan nilai tambah barang melalui pengemasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan media sosial/internet sebagai sarana pemasaran 2. Melakukan kegiatan promosi lisan kepada masyarakat (informasi mulut ke mulut) 3. Memasang iklan cetak/menyebarkan brosur kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjual barang langsung kepada konsumen (tidak melalui tengkulak) 2. Menyediakan jasa pengiriman barang bagi konsumen

Sumber: Roberts (2004), Rogers (1983)

Lanjutan Tabel 1.3

Kriteria	Indikator	Tolak Ukur
Pengelolaan Sumber Daya dan Produksi Berkelanjutan	2. Perluasan pasar:	
	● Penetrasi Pasar	
	a. Peningkatan frekuensi pembelian oleh konsumen	Kontinuitas pembelian barang oleh konsumen
	b. Peningkatan kuantitas barang yang dijual kepada konsumen	1. Peningkatan jumlah barang yang dibeli konsumen 2. Upaya mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak (pemberian potongan harga untuk grosir)
	c. Penjualan barang kepada non-konsumen	1. Barang dijual kepada siapa saja (tidak hanya dijual kepada pelanggan) 2. Peningkatan jumlah konsumen baru yang membeli barang 3. Adanya persaingan dengan produsen lain untuk mendapatkan konsumen
	d. Penjualan barang kepada <i>non-buyers</i>	1. Adanya upaya untuk menangkap potensi pasar (<i>potential market</i>)
● Pengembangan Pasar		
a. Pemasaran di wilayah baru (<i>geographic segment</i>)	1. Perluasan pasar ke wilayah lain 2. Membuat saluran distribusi untuk pemasaran produk di wilayah baru (misal cabang dan agen)	
b. Pemasaran pada pengguna baru (<i>demographic segment</i>)	Membuat desain produk yang berbeda-beda (difersifikasi) untuk segmen pasar tertentu (jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan)	

Sumber: Schultz (2004)

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi dalam pengumpulan data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui survei primer langsung kepada pemilik dan pekerja UMKM. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan kepada pemilik UMKM adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan kepada pekerja UMKM adalah penyebaran kuesioner dan observasi pada objek yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui survei instansional pada beberapa instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Bekasi serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. Selain itu, data sekunder pun didapat dengan melakukan tinjauan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan konsep dalam penelitian ini.

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian (Moeloeng, 2005). Dalam hal ini, metode wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara mendalam, akan dilakukan penggalian informasi secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian tersebut dilakukan untuk mengetahui pendapat narasumber berdasarkan perspektifnya dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang narasumber secara bertatap muka (*face to face*).

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis, serta informasi mengenai sistem pengelolaan sumber daya dan produksi yang digunakan pada UMKM saat ini. Wawancara dilakukan kepada pemilik UMKM aksesoris, Koordinator UMKM Aksesoris Desa Taman Rahayu, Pemerintah Desa Taman Rahayu, Pemerintah Kecamatan Setu, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai pekerja UMKM.

3. Observasi

Menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2011), observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, serta proses atau perilaku. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat kondisi tempat tinggal para pekerja UMKM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan mereka, serta untuk melihat sistem produksi yang dilakukan oleh UMKM.

4. Tinjauan dokumen dan literatur

Dokumen yang dikumpulkan dan ditinjau dalam penelitian ini meliputi dokumen statistik, peraturan perundang-undangan ataupun literatur yang telah terpublikasikan seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

1.6.5 Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sampel melalui pendekatan kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang maksimum. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Lebih lanjut, penjelasan mengenai kedua teknik sampling tersebut adalah sebagai berikut.

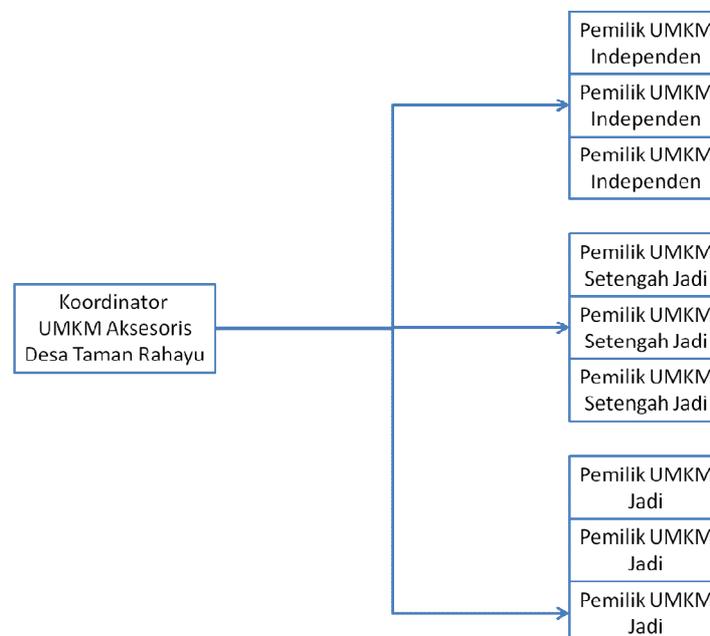
1. *Purposive Sampling*

Menurut Sugiyono (2011), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* dilakukan pertama kali untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian melalui beberapa kriteria. Setelah wilayah penelitian ditetapkan, maka digunakan beberapa kriteria lainnya untuk menentukan narasumber yang akan menjadi informan kunci. Setelah itu, akan didapatkan informan-

informan kunci dan juga narasumber-narasumber yang akan menjadi sumber informasi untuk penelitian ini. Selain itu, setelah wilayah penelitian ditetapkan berdasarkan *purposive sampling*, seluruh populasi pekerja UMKM di wilayah tersebut pun ditetapkan sebagai responden dalam penelitian.

2. *Snowball Sampling*

Dalam *snowball sampling*, responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan seterusnya secara serial, sehingga dicapai taraf kejenuhan yang berarti bahwa responden baru tidak memberikan informasi baru sehingga keragaman informasi baru tidak ditemukan lagi. Dalam penelitian ini, teknik *snowball sampling* dilakukan pada wawancara para pemilik UMKM. Informan kunci pada teknik *snowball* ini adalah Koordinator UMKM Aksesoris Desa Taman Rahayu. Koordinator UMKM tersebut kemudian memberikan rekomendasi para pemilik UMKM berdasarkan jenisnya untuk menjadi sampel selanjutnya. Setelah itu, sampel tersebut pun memberikan rekomendasi para pemilik UMKM yang sejenis dengan UMKM miliknya.



Gambar 1.3 Narasumber Berdasarkan Snowball Sampling

Sumber: Analisis, 2015

Berikut ini merupakan daftar narasumber yang diwawancarai melalui teknik *snowball sampling* berdasarkan jabatan/posisi yang dimiliki beserta waktu pengumpulan data.

Tabel 1.4 Narasumber Koordinator UMKM dan Pemilik UMKM

Jabatan/Posisi	Narasumber	Waktu Pengumpulan Data
Koordinator UMKM Aksesoris Taman Rahayu	Maman	29 Mei 2015
Pemilik UMKM Independen	Ahmad Yani	29 Mei 2015
	Ajat Sudrajat	12 Juni 2015
	Hj. Rokanah	13 Juni 2015
	Karman	16 Juni 2015
Pemilik UMKM Setengah Jadi	Fakih Mukadis	12 Juni 2015
	Suherman	17 Juni 2015
	Jayadi	18 Juni 2015
Pemilik UMKM Jadi	Ardiansyah	29 Mei 2015
	Acah Sadiyah	29 Mei 2015
	Caca	18 Juni 2015
	Endang Sujana	18 Juni 2015

Sumber: Analisis, 2015

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis data kuantitatif dan kualitatif. Proses pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran kondisi sesungguhnya mengenai kesejahteraan masyarakat yang bekerja di UMKM aksesoris Desa Taman Rahayu. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasi dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan menginterpretasikan variabel penelitian satu persatu. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif tersebut disajikan dalam bentuk persentase, grafik, maupun diagram.

Analisis dalam pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis studi kasus tunggal (*single case study*) berupa pencocokan pola (*pattern matching*) terhadap proposisi. Proposisi merupakan arahan teoritis

yang digunakan untuk membangun protokol penelitian. Protokol penelitian adalah petunjuk praktis pengumpulan data yang harus diikuti oleh peneliti agar penelitian terfokus pada konteksnya (Yin, 2003). Pada proses analisis data, proposisi kembali digunakan sebagai pijakan untuk mengetahui posisi hasil penelitian terhadap teori-teori yang ada. Dengan mengetahui posisi tersebut, dapat ditetapkan apakah hasil penelitiannya mendukung, memperbaiki, memperbaharui, atau bahkan mematahkan teori yang ada. Disamping fakta yang mendukung proposisi, fakta yang bertentangan terhadap proposisi juga diperhatikan, untuk menghasilkan keseimbangan analisis, sehingga objektivitas hasil penelitian dapat terjaga (Yin, 2003). Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dibangun beberapa proporsisi pada setiap sasaran, yaitu:

Sasaran 1:

Mengidentifikasi peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Proposisi:

1. UMKM berperan dalam mendistribusikan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Tambunan, 2009)

Sasaran 2:

Mengidentifikasi peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis

Proposisi:

1. UMKM mampu mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai gender, usia, dan etnis (Tambunan (2009), Freeman (2013), dan Forth et al (2006))
2. UMKM mampu menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2009)

Sasaran 3:

Mengidentifikasi sistem pemanfaatan sumber daya dan produksi pada UMKM

Proposisi:

1. Sistem produksi yang dimiliki UMKM saat ini cenderung kurang memerhatikan dan menyadari eksternalitas terhadap lingkungan karena sumber daya yang dimiliki oleh UMKM lebih sedikit daripada sumber

daya yang dimiliki oleh usaha besar untuk berinvestasi pada alat-alat dan manajemen produksi sebagai upaya perbaikan kondisi lingkungan, sehingga melibatkan UMKM sebagai subjek pembangunan berkelanjutan adalah hal yang sulit (OECD, 2000)

2. UMKM mampu berinovasi dengan penciptaan atau *re-engineering* produk untuk memenuhi kebutuhan pasar (OECD, 2000)
3. UMKM mampu mengembangkan teknik baru untuk memperluas penjualan (OECD, 2000)

1.6.7 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara umum yang meliputi latar belakang, rumusan persoalan, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri atas ruang lingkup wilayah dan materi, metode penelitian yang terdiri atas metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi teori pengembangan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat, kesenjangan wilayah, kesenjangan demografis, pembangunan ekonomi berkelanjutan, sistem produksi berkelanjutan, serta teori-teori terkait UMKM.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Pada bab ketiga ini, akan dibahas deskripsi umum mengenai karakteristik wilayah studi yang dimulai dari gambaran umum Kabupaten Bekasi, gambaran umum UMKM di Kabupaten Bekasi, serta gambaran umum UMKM aksesoris di

Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu meliputi sejarah, perkembangannya, hingga teknik produksi yang digunakan.

BAB IV ANALISIS PERAN UMKM SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Pada bab ini, akan dijabarkan analisis peran UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi lokal yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu analisis peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, analisis peran UMKM dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan demografis, serta analisis sistem pemanfaatan sumber daya dan produksi berkelanjutan pada UMKM.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai temuan studi, kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan, rekomendasi, serta kelemahan studi yang dapat menjadi masukan untuk penelitian lebih lanjut.